

P.G.H.

K E P U T U S A N

sidang Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh pada hari KEMIS tgl. 9 Februari
1950.-

No. 6.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH
anggauta jang berhadir :
 1. Tgl.M.Noer El Ibrahimy
 2. T.M.Amin
 3. Abdul Gani (ajah Gani)
 4. A.R.Hasjim
 5. O.K.H.Salamoedin
 Wkl. Sekretaris : Kamaroesid

Jang dibilitjarakan:

77. Memperbaiki djalan Atjeh Barat, antara K.M.285 dengan 299
78. Permintaan Tuan Djamaloedin anggauta Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat
79. Pindjaman uang untuk mendirikan rumah2 pegawai
80. Minta pendjelasan atas penangkapan tuan Riphatsenikentara
81. Permintaan crediet Badan Executif D.P.R.K. Atjeh Tengah sebanjak R.15.000.000,- untuk belandja sidang pleno di Koetatjane
82. Dewan Kabupaten Langkat
83. Soal gadji Pegawai dibajar dengan uang federal
84. Rantjangan Pedoman bekerdja D.P.D. Propinsi Atjeh
85. Agentschap K.P.M.
86. Pembagian Motor dan Kereta angin kepada Kabupaten.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Atjeh
2. Anggauta2 D.P.D.

Koetaradja, 9 Februari 1950
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROPINSI ATJEH,
Ketua, Wkl.Sekretaris,

(Tgk.M.Daoed Beureueh)

(Kamaroesid)

77. Memperbaiki djalan2 di Atjeh Barat, antara K.M. 285 dengan 299 (surat Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum tanggal 16 Januari 1950 No.170/PDG/PSU/D).

Berkenaan dengan djalan jang dimaksud terletak ditepi sungai Tripa dan satu-satinja djalan jang memperhubungkan antara Atjeh Barat dengan Atjeh Selatan, jang sewaktu-waktu dichewatiri akan putus karena akibat bandjir, disetudjui untuk mengeluarkan biaja sebanjak R.10.000.000.-

78. Permintaan tuan Djamaloe-din, anggauta Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat (surat tanggal 26-1-1960 dengan susulan 7-2-1950.-

Surat permintaan itu harus dimadukan kepada D.P.R.K. Atjeh Barat di Meulebch dan bukan kepada D.P.D. Propinsi Atjeh, Berhubung dengan itu, surat jang tersebut diserahkan kepada D.P.R.K. Atjeh Barat dengan tjetatan supaja memperoleh pengurusannya.

79. Pindjaman uang untuk mendirikan rumah2 pegawai (surat D.P.R.K. Atjeh Utara tanggal 31-12-1949 No.1081/8).

Prinsip dapat disetudjui, akan tetapi berhubung dengan keuangan dewasa ini, permintaan tersebut mungkin tidak dapat diperkenankan.

80. Minta pendjelasan berkenaan dengan penangkapan atas diri tuan Riphah Senikentara (surat Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Timur tgl.19-1-1950 No. 203/9).

Dengan permintaan jang sama, disampaikan kepada Gubernur Atjeh.

81. Permintaan crediet Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Tengah, untuk ongkos sidang pleno D.P.R.K. Atjeh Tengah di Koetatjane banjakna R.15.000.000.- (surat tgl.21-1-1950 No.153/Ku/BE/1950).

Memperhatikan keadaan keuangan dewasa ini, permintaan sebanjak ----- R.15.000.000.- untuk ongkos sidang pleno D.P.R.K. Atjeh Tengah di Koetatjane, tidak dapat dipenuhi.

82. Dewan Kabupaten Langkat (anggauta O.K.H.Salamoe-din).

Berhubung dengan D.P.R.K. Langkat sampai sekarang ini belum dibentuk, diandjurkan supaja pembentukan itu dengan segera dilaksanakan atas dasar peraturan Keresidenan Atjeh No,3 tgl. 10 December 1946.

Oleh karena Kwedanaan telah dihapuskan, panitia pemilihan Kewedanaan jang tersebut dalam peraturan itu boleh dikesampingkan.

83. Soal gadji pegawai dibayar dengan uang federal (anggauta O.K.H. Salamoedin)

Soal ini akan dipeladjari lebih lanjut. Bila ternjata merugikan kepada pegawai, kelak akan dimadujukan keberatan2nya itu kepada pemerintah Pusat.

84. Rantjangan Pedoman bekerja D.P.D. Propinsi Atjeh (anggauta T.M.Amin).

Diserahkan kepada Kepala Tata-Hukum, dengan lebih dulu mengadakan rembukan dengan anggauta T.M.Amin supaja memperbuat rantjangan Pedoman jang baru, dengan mengambil petunjuk2 kepada isi dari rumah tangga

Propinsi Atjeh (Peraturan Wakil Perdana Menteri dan peraturan keuangan-nya serta dari U.U. No.22/1948).

85. Agent K.P.M.

Untuk memperoleh sumber penghasilan bagi Propinsi Atjeh, diperdjuangkan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Kemakmuran R.I.S. dengan perantaraan Kementerian Dalam Negeri R.I.), supaja Agentschap K.P.M. dalam lingkungan Propinsi Atjeh, diserahkan kepada Propinsi.

86. Pembagian Motor dan Kereta angin kepada Kabupaten (anggauta T.M.Amin)

Mendjadi perhatian. Dalam pada itu kepada Residen d/b jang mengurus pembagian motor dan Kereta angin, akan diminta keterangan, Kabupaten2 mana jang telah mendapat pembagian itu. Seterusnya untuk pembagian jang akan datang, hendaknya disamping pembagian djawatan2 Sentral, pembagian dan kepentingan Propinsi, harus memperoleh perhatian djuga dan pembagian tersebut, diserahkan kepada Propinsi untuk mengurusnya. -

Lr. hal. telis disampaikan
kepada B.P.S.
Bkt. No
B
21/- 000
21/2